

BAB II

PROFIL NEGARA TIONGKOK

Pada bab ini penulis akan memaparkan lebih lanjut mengenai profil negara Tiongkok yang meliputi kondisi geografis Tiongkok beserta keadaan geopolitiknya. Penulis juga akan memaparkan tentang keadaan perekonomian Tiongkok meliputi perkembangan ekonomi Tiongkok dan secara khusus akan menjelaskan kondisi ekonomi Tiongkok pada masa pemerintahan Xi Jinping. Kemudian penulis juga akan menjelaskan kondisi militer Tiongkok pada masa pemerintahan Xi Jinping.

A. Geopolitik Tiongkok

Geopolitik (*Geographical Politic*) merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang sebuah fenomena politik dilihat dari aspek geografi. Dikemukakan pertama kali oleh Frederich Ratzel kemudian dikembangkan lebih dalam oleh Rudolf Kjellen dan Karl Haushofer (Dwi Sulisworo, 2012, hal. 2). Tiongkok memiliki lokasi geografis yang bisa dibilang sangat menguntungkan dikarenakan terletak di antara banyak negara sehingga akses untuk menjalin hubungan kerja sama pun bisa dijangkau dengan mudah. Tiongkok mendapatkan reputasi sebagai negara terbesar ke-3 di dunia yang terletak di kawasan Asia Timur dan berbatasan langsung dengan wilayah seperti Asia Selatan, Asia Tenggara dan kawasan Eropa.

1. Letak Geografis Tiongkok

Tiongkok memiliki posisi yang sangat strategis jika dibandingkan dengan negara lain. Lokasinya yang tepat berada di tengah-tengah negara ataupun benua membuat Tiongkok memiliki perbatasan diikuti dengan akses secara langsung dengan negara tetangga bahkan antar kawasan benua. Selain itu karakteristik lingkungan di Tiongkok juga beragam, mulai

dari wilayah tropis, gersang padang pasir, hingga bersalju di pegunungan juga dimilikinya.

Gambar 2. 1 : Peta lokasi Negara Tiongkok



Sumber : Worldatlas. (2019, Januari 5). World Map - China. Diambil kembali dari Worldatlas: <https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/cn.htm>

Secara astronomis Tiongkok berada pada lintang 18° LU – 54° LU dan 73° BT – 135° BT dan memiliki total luas area mencapai $9,596,960 \text{ km}^2$ yang terbagi atas $9,326,410 \text{ km}^2$ merupakan dataran sementara $270,550 \text{ km}^2$ adalah wilayah perairan (The World Factbook, 2018). Luas 9,5 juta km^2 terbagi menjadi beberapa area seperti wilayah pegunungan, gurun pasir, artik, perairan dan wilayah tanah subur. Selain itu wilayah Tiongkok terbagi atas 4 wilayah atau *region* yaitu daerah utara, selatan, barat laut dan Qinghai-Tibet dimana pada setiap wilayah tersebut tentunya memiliki karakteristik yang berbeda.

Gambar 2. 2 : Peta topografi Negara Tiongkok



Sumber : Worldatlas. (2019, Januari 5). World Map - China. Diambil kembali dari Worldatlas: <https://www.worldatlas.com/webimage/countries/asia/cn.html>

Daerah utara dan barat didominasi oleh area gurun pasir dan dataran tinggi, cenderung panas dan seperti wilayah artik dan untuk bagian timur dan selatan merupakan dataran rendah yang subur serta beriklim tropis (Jeff Harbach, 2010, hal. 3). Himalaya merupakan pegunungan di Tiongkok dengan gunung Everest sebagai gunung tertinggi di dunia dengan ketinggian mencapai 8848 meter diatas permukaan laut (mdpl) (BBC News, 2010). Area pegunungan tersebut menjadikan sebuah batas negara antara Tiongkok dengan Nepal, India, dan Bhutan, sementara untuk ujung timur laut dari pegunungan Himalaya akan memberikan perbatasan dengan Negara Rusia. Kemudian untuk wilayah gurun pasir terdapat Gurun Gobi yang membentang dari barat ke timur dan memberikan batas negara dengan Mongolia. Kemudian untuk bagian sungai,

terdapat banyak sekali sungai di Tiongkok namun yang terkenal dari sekian banyak sungai tersebut adalah Sungai Yangtze, Sungai Kuning, Sungai Yarlung Zangbo dan Mekong. Sungai Yangtze terkenal akan sungai terpanjang di Tiongkok maupun di Asia dan terpanjang ketiga di dunia.

Memiliki posisi wilayah di tengah juga menjadikan Tiongkok memiliki banyak tetangga yang berbatasan langsung. Sebelah utara Tiongkok berbatasan dengan negara Mongolia, selatan dengan Nepal, India, Laos, dan Vietnam, sebelah timur berbatasan dengan Korea serta di sebelah barat berbatasan dengan Pakistan, Kirgizstan, Tajikistan dan Kazakhstan. Secara keseluruhan Tiongkok berbatasan langsung dengan 14 negara yaitu Vietnam, Laos, Burma, India, Korea, Bhutan, Nepal, Pakistan, Afghanistan, Tajikistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Rusia dan Mongolia. Untuk wilayah perairan, Tiongkok berbatasan langsung dengan 8 negara yaitu Korea Selatan, Jepang, Korea Utara, Indonesia, Filipina, Brunei, Malaysia, dan Vietnam (Travel China Guide, 2019).

Tiongkok terbagi atas beberapa area bagian, diantaranya 23 wilayah provinsi, 5 daerah otonomi, 4 wilayah kota atau munisipalitas dan 2 kawasan administratif (Jeff Harbach, 2010). Kawasan munisipalitas tersebut meliputi Beijing sekaligus menjadi ibukota Tiongkok, Shanghai, Tianjin dan Chongqing. Kemudian untuk wilayah otonomi terdapat Mongolia dalam, Guangxi Zhuang, Xinjiang Uyghur, Ningxia Hui dan Tibet. Sementara daerah administratif khusus adalah Hongkong dengan Makau.

2. Sistem Politik Tiongkok

Kemudian untuk sistem pemerintahan Tiongkok sendiri berbentuk negara komunis serta terpusat dan dipimpin oleh seorang presiden yang mempunyai masa jabatan selama 5 tahun. Pada tahun 2013-2018 Tiongkok dipimpin oleh Xi

Jinping dan akan berlanjut untuk periode selanjutnya. Kemudian kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri yang memiliki masa jabatan 5 tahun dan pada tahun 2013-2018 lalu Li Keqiang ditunjuk sebagai kepala pemerintah. Tiongkok menggunakan sistem kongres rakyat sebagai sistem politik dasarnya yang di bawah triaspolitika. Namun sistem tersebut berbeda dari umumnya karena di Tiongkok kongres rakyat dikukuhkan dalam peraturan undang-undang negara sebagai badan kekuasaan negara tertinggi.

Parlemen di dalam Tiongkok menerapkan sistem unikameral, yaitu Kongres Rakyat Nasional dengan jumlah anggota sebanyak 2979 orang terdiri dari perwakilan daerah, kota dan provinsi untuk masa jabatan 5 tahun (Triraharjo, 2015). Unikameral merupakan salah satu jenis sistem pemerintahan dalam parlemen yang hanya memiliki satu kamar parlemen, fungsi dari dewan legislatif akan terpusat kepada satu badan legislatif di negara tersebut (Pengertian Menurut Para Ahli, 2019). Sistem unikameral banyak diterapkan di dalam negara sosialis karena dianggap memberikan banyak keuntungan seperti efisiensi pemerintahan, segi biaya lebih murah, sifat pertanggungjawaban tegas, dan lebih menggambarkan keputusan kekuasaan langsung dari pemimpin atau konstituen.

Segala sesuatu yang menyangkut pengambilan keputusan akan dibahas dan diputuskan oleh sekelompok orang yang berada di politbiro. Anggota dari politbiro berjumlah 25 orang dan dipilih oleh komite sentral. Sementara itu badan yang nantinya akan memutuskan sebuah pembahasan adalah komite tetap politbiro yang memiliki anggota 7 orang. Anggota dari komite tetap politbiro pada masa jabatan saat ini adalah Xi Jinping, Li Keqiang, Han Zheng, Wang Yan, Wang Huning, Li Zhanshu, dan Zhao Liji (Yan, 2017).

Mengenai kepartaian, Tiongkok menerapkan sistem multipartai. Partai yang terkenal dan mencolok adalah Partai Komunis Cina atau *Chinese Communist Party* (CCP). Badan partai tersebut dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal dimana saat sekarang ini Xi Jinping menjadi sekretarisnya dari tahun 2013 hingga sekarang yang menggantikan Hu Jintao pada periode sebelumnya.

3. Keuntungan Geopolitik Tiongkok

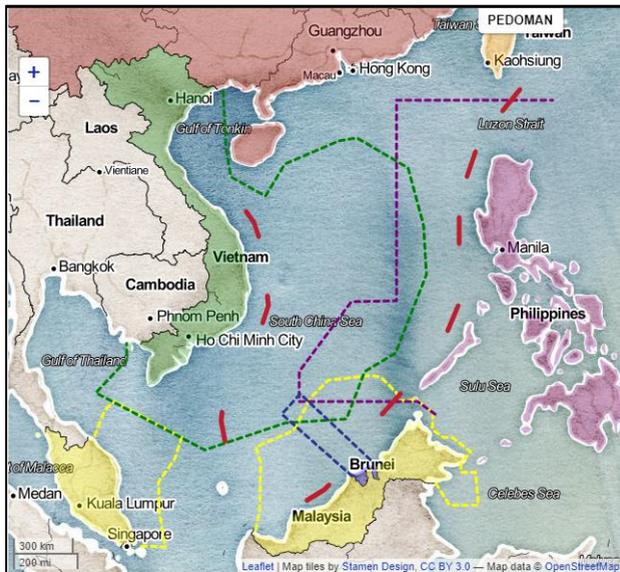
Dengan dikelilingi oleh beberapa negara, kawasan serta wilayah perairan membuat Tiongkok memiliki keuntungan berupa posisi yang sangat strategis. Negara tersebut seperti Rusia, India, dan Korea yang memiliki kekuatan besar di dunia. Lalu untuk kawasan bisa diambil contoh seperti dengan kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan, dan wilayah perairan seperti Laut Cina Selatan serta Laut Cina Timur. Hal tersebut tentunya telah memberikan keuntungan bagi Tiongkok dalam segala sektor.

Hubungan diplomatik Tiongkok dengan Rusia sudah terjalin semenjak belum runtuhnya Uni Soviet, namun dalam perkembangannya sempat mengalami fluktuasi dan setelah tahun 1950 kondisinya semakin membaik. Kedua negara tersebut terus meningkatkan hubungan diplomasi beserta kegiatan investasinya. Seperti yang diucapkan oleh Xi Jinping saat pertemuan kedua negara pada *Eastern Economic Forum* (EEF) di Vladivostok tahun 2018 (Natalia, 2018). Dalam pertemuan tersebut juga dijelaskan bahwa Tiongkok akan lebih terbuka untuk kerja sama internasional, siap mempelajari transfer teknologi dari negara lain dan terus saling meningkatkan investasi dalam bidang pertanian, pariwisata, infrastruktur dan sektor energi. Keuntungan yang terlihat jelas diantara hubungan kedua negara adalah sektor ekspor impor minyak mentah. Dari total impor minyak mentah Tiongkok sebanyak 112,1 juta ton pada tahun 2018, Rusia merupakan eksportir pertama yang kemudian disusul Arab Saudi di

tempat kedua dan Angola pada posisi ketiga (Nabila, 2018). Salah satu faktor penyebab hal tersebut adalah kondisi geografis dimana kedua negara terletak lebih dekat dan hubungan diplomatiknya terjalin dengan baik.

Tiongkok juga menunjukkan terdapat kepentingan dan memberikan pengaruh yang kuat pada kawasan Asia Selatan. Dari kondisi tersebut tentunya Tiongkok keuntungan dari hubungan dengan negara-negara di Asia Selatan terutama India. Dalam artikel karya Andrew Small yang berjudul *Regional Dynamics and Strategic Concerns in South Asia: China's Role* menyatakan bahwa Tiongkok memiliki kepentingan khusus dalam bidang ekonomi di kawasan Asia Selatan dengan adanya bukti bahwa wilayah di sekitar perbatasan area Selatan tersebut sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan karena terjalin hubungan kerja sama dengan wilayah India, Afghanistan, dan Pakistan, wilayah tersebut seperti Xinjiang, Tibet, dan area Barat Daya Provinsi Yunan (Small, 2014, hal. 3-5). Faktor dari kedekatan lokasi geografis dan terjadinya hubungan diplomasi yang kondusif telah mendorong Tiongkok mendapatkan keuntungan atas hubungan tersebut.

Gambar 2.3 : Peta lokasi Laut Cina Selatan



Sumber : Cobus, P. (2019, Maret 12). Konflik dan Diplomasi di Laut. Diambil kembali dari VOA Indonesia: <https://projects.voanews.com/south-china-sea/indonesian/>

Berada di wilayah Samudera Pasifik dan berbatasan langsung dengan beberapa negara membuat Laut Cina Selatan memiliki posisi serta potensi yang strategis. Berdasarkan data dari *International Hydrographic Organization* (IHO) Laut Cina Selatan berada pada Selatan Tiongkok, Timur dari Vietnam, Malaysia, Sumatra serta selat Singapura, Barat Filipina dan Utara dari Borneo dan Pulau Bangka Belitung (*International Hydrographic Organization, 1953, hal. 30-31*). Memiliki potensi besar karena di dalamnya terkandung banyak kandungan minyak bumi, gas alam, dan digunakan untuk jalur distribusi pelayaran internasional. Hal tersebut diperkuat dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh *The Committee for Coordination of Joint Prospecting For Mineral Resources*

In Asian offshore Areas, Economic Commission for Asia and The Far East sejak tahun 1960 menghasilkan data bahwa terdapat potensi besar di kawasan Laut Cina Selatan untuk sektor minyak dan gas bumi serta terdapat banyak variasi di dalam sektor perikanan (Usman & Sukma, 1997). Hasil dari lalu lintas perdagangan internasional setiap tahunnya memiliki nilai kurang lebih 5,3 triliun dolar Amerika serta kandungan minyak bumi di dalamnya kurang lebih 11 miliar barel dan untuk gas alam 190 triliun kaki kubik, diperkirakan juga pada tahun 2035 diperkirakan kegiatan perdagangan sebanyak 90 persen lalu lintas pengangkutan minyak bumi dari Timur Tengah menuju Asia akan melewati Laut Cina Selatan (Hardoko, 2017).

Dengan adanya potensi serta lokasi yang strategis tersebut membuat Tiongkok ingin menguasai dan memberikan pengaruh dalam kawasan Laut Cina Selatan. Serangkaian cara pun telah dilakukan Tiongkok demi mendapatkan dan mencapai kepentingan nasionalnya. Usaha Tiongkok dalam mempertahankan wilayah Laut Cina Selatan sudah dimulai sejak tahun 1947 pada saat masih dikuasai Partai Kuomintang yang membuat garis demarkasi “eleven-dash line” kemudian mengalami penyederhanaan menjadi “nine-dash line” (Hardoko, 2017). Kekuatan militer juga digunakan Tiongkok untuk mempertahankan pengaruhnya, tidak hanya itu Tiongkok juga membangun infrastruktur militer seluas 1.300 hektar di kawasan tersebut (Cobus, 2019).

Selain itu hal paling utama yang bisa dilihat jelas dari keuntungan letak geografis Tiongkok adalah ambisi untuk membangun kembali jalur perdagangan yang telah lama tidak terdengar yaitu jalur sutera atau *silk road*. Proyek besar tersebut diangkat oleh Xi Jinping pada tahun 2013 dan mengajak negara-negara di sekitar jalur untuk ikut bergabung dan berinvestasi. Jalur sutera akan menghubungkan beberapa negara baik dalam jalur darat maupun perairan. Untuk wilayah darat akan menghubungkan Tiongkok dengan Eropa Timur,

Eropa Barat dan Rusia. Kemudian untuk wilayah perairan akan menghubungkan wilayah Asia Tenggara, Asia Selatan, Afrika Timur, Afrika Utara dan berakhir di Eropa.

Gambar 2. 4 : Peta Jalur Sutera Tiongkok



Sumber : Munro, K. (2017, November 10). What is the Belt and Road Initiative? Diambil kembali dari SBS: <https://www.sbs.com.au/news/explainer/what-chinas-belt-and-road-initiative>

Proyeksi kedepan dari jalur sutera bagi Tiongkok adalah untuk memperkuat kerja sama dengan negara dan kawasan di berbagai bidang perekonomian, memperkuat infrastruktur, dan mengajak negara-negara berkembang untuk bangkit. Oleh karena itu Tiongkok juga selalu menjaga hubungan yang baik antar negara agar tercipta iklim yang harmonis di sekitar kawasan demi tercapainya ambisi besar tersebut.

Ditambah lagi Tiongkok memiliki banyak penduduk yang berada di rentang masa produktif, hal ini akan lebih menunjang kegiatan industrialisasi yang sedang berjalan. Tiongkok telah berhasil memaksimalkan atas bonus demografi

yang dimilikinya dengan semakin bertumbuhnya kegiatan industri. Selain mendapatkan bonus demografi, langkah pemerintah dalam menarik investor dan mengubah aliran dana masuk tersebut menjadi kawasan industri dan pembangunan infrastruktur serta ditambah dengan diubahnya kebijakan-kebijakan mengenai peraturan investasi dan industri telah mendorong Tiongkok menuju arah yang sangat menguntungkan. Kemudian ditunjang dengan saling berbatasan dengan banyak negara dan jalur sutera secara geografis membuat Tiongkok tidak akan kesulitan mencari pasar.

B. Perekonomian Tiongkok

1. Sejarah Ekonomi Tiongkok

Tiongkok mulai bangkit perekonomiannya pasca pimpinan Mao Zedong atau di bawah pimpinan Deng Xiaoping. Deng adalah sosok orang yang membawa Tiongkok ke periode perekonomian Sosialis-Kapitalis pada tahun 1978 melalui kebijakan reformasi bernama “Reformasi dan Keterbukaan” (*Gaige Kaifang*). Kemudian Tiongkok mulai membuka ekonominya secara global pada tahun 1982 termasuk mulai menerima investasi asing. Fenomena Globalisasi juga turut mendorong Tiongkok untuk membuka diri terhadap dunia luar diawali dengan mulai menjalin berbagai hubungan kerja sama dan ikut serta dalam organisasi-organisasi internasional. Hal tersebut yang memicu dari awalnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok berkembang pesat.

Pada tahun 1980 Tiongkok menciptakan sebuah zona khusus ekonomi atau *Special Economic Zones* di Provinsi Fujian dan Guangdong (kabupaten dari Shenzhen). Jae Ho Chung menulis dalam bukunya yang berjudul *Charting China's Future : Political, Social, and International Dimensions* tentang 5 kunci kesuksesan Tiongkok yaitu : 1) Desentralisasi; 2) Marketisasi berorientasi pada mekanisme pasar; 3) Diversifikasi kepemilikan adalah penganekaragaman

kepemilikan; 4) Liberalisasi di bidang ekonomi dan pemikiran; 5) Internasionalisasi (Chung, 2006, hal. 2).

Tiongkok mulai masuk kedalam era perdagangan yang lebih terbuka dan multilateral semenjak bergabung kedalam organisasi *World Trade Organization* (WTO) pada tahun 2001 lalu. Pada saat itu Tiongkok memegang teguh serta terus mempromosikan untuk memajukan pembangunan melalui reformasi dan keterbukaan, mulai aktif dalam kerja sama dan persaingan di dunia internasional, dan membentuk pola keterbukaan yang lebih luas serta multilevel. Selain aktif dalam organisasi WTO, Tiongkok juga ikut tergabung kedalam organisasi internasional baik formal maupun non-formal seperti *Shanghai Cooperation Organization* (SCO), *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC), BRICS, BCIM, G20, ASEAN+3 dan menjadi anggota tetap dewan keamanan PBB.

2. Ekonomi Masa Xi Jinping

Semenjak memimpin pemerintahan Tiongkok periode 2013 – 2018, di dalam bidang ekonomi Xi Jinping tidak terlalu membawa banyak perubahan besar namun hanya penyempurnaan dari warisan sebelumnya. Xi menyampaikan sebuah pidato saat masa awal jabatannya ketika menghadiri KTT Pemimpin dan Perdagangan *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC) di Bali yang menjelaskan mengenai kebijakan “reformasi dan keterbukaan” Tiongkok. Reformasi dan keterbukaan merupakan sebuah sistem ekonomi yang telah diterapkan Tiongkok sejak tahun 1978 dan tetap digunakan hingga masa sekarang ini dan Tiongkok terus bergantung dalam sistem tersebut. Menurut Xi, sistem ekonomi tersebut hanya perlu disempurnakan, harus ada dorongan reformasi dalam sistem administrasi, mulai membentuk sistem inovasi dan teknik, meningkatkan pelestarian lingkungan serta menyempurnakan jaminan dan layanan publik. Selain itu Tiongkok akan aktif menerapkan strategi keterbukaan, meningkatkan kerja sama investasi dan mendorong

perkembangan seimbang perdagangan luar negeri (China Radio Online, 2013).

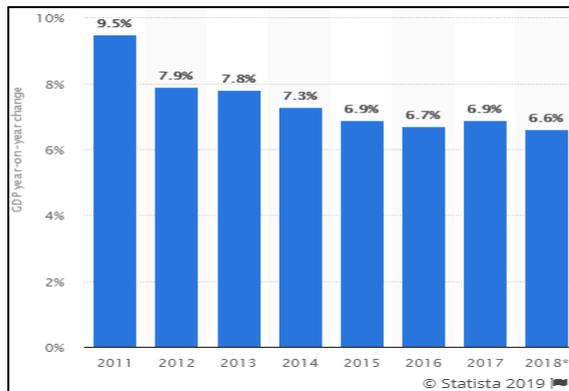
Tiongkok juga memberikan usulan mengenai pendirian bank investasi infrastruktur Asia untuk memberikan dukungan dana pembangunan infrastruktur di negara berkembang kawasan Asia-Pasifik. Usulan tersebut akhirnya dapat terealisasi dengan wujud sebagai bank yaitu *Asia Infrastructure Investment Bank* (AIIB). Usulan pendirian Bank AIIB pertama kali dicetuskan oleh Xi Jinping saat dalam pertemuan *Asia Pasific Economic Cooperation* (APEC) di Bali pada Oktober 2013 dan telah mengeluarkan modal sebesar 50 miliar dolar AS atau setara dengan 650 triliun rupiah (Suhendra, 2016). Tujuan dari pendirian bank tersebut tidak lain adalah sebagai ambisi Tiongkok untuk menebarkan modal kepada negara berkembang dengan memanfaatkan hubungan jalur sutera yang telah dibangun dan ingin memprakarsai pembangunan proyek infrastruktur di sekitar jalu sutera yang sebelumnya tidak dapat ditangani oleh *Asian Development Bank* (ADB).

Hubungan antar negara juga terus dijalin dengan baik dan ditingkatkan terutama dalam bidang ekonomi yang bisa dilihat dari beberapa kunjungan Presiden Xi Jinping. Kegiatan kunjungan tersebut bertujuan tidak lain untuk memperkuat hubungan bilateral, ekonomi dan stabilitas keamanan antar negara maupun kawasan. Pada bulan Maret 2013 dan Februari 2014 Xi mengunjungi Rusia dalam rangka menciptakan iklim internasional yang menguntungkan, lalu saat bulan Maret 2014 diadakan kunjungan ke 4 negara di Eropa untuk menegaskan kemitraan mengenai “perdamaian, pertumbuhan, reformasi dan peradaban” (Embassy of the People's Republic of China in the Republic of Indonesia, 2014). Kemudian tahun 2015 Xi mengunjungi Inggris untuk membicarakan kesepakatan dagang dan investasi, tahun 2016 mengadakan kunjungan ke Arab Saudi, tahun 2017 mengadakan kunjungan ke Vietnam dan pada tahun 2018 mengunjungi Filipina.

Jalur sutera juga memberikan peran penting di dalam perekonomian Tiongkok dikarenakan salah satu tujuan

dibangunnya kembali jalur sutera adalah untuk memperkuat perdagangan dengan menghapuskan hambatan dagang (*trade barriers*) dan memangkas biaya pengiriman logistik agar lebih efisien (Debora, Ambisi Cina dengan Proyek Jalur Sutra Abad 21, 2017). Potensi yang dimiliki dari jalur sutera sangat besar, diantaranya terdapat potensi pasar sebesar 3 miliar jiwa dan untuk kawasan Asia Tenggara sendiri memiliki populasi sebesar 600 juta jiwa. Selain efisiensi biaya, jalur sutera juga memberikan efisiensi waktu. Apabila pengiriman logistik dilakukan melalui jalur udara tentunya akan menambah biaya pengiriman yang tidak sedikit, jika dikirim melalui kapal tentunya akan memakan waktu lama dan jarak tempuh yang jauh. Kemudian pada April 2017 telah dibuka layanan logistik menggunakan kereta dari Tiongkok menuju ke Inggris dengan panjang rel kereta mencapai 12.000 kilometer dan hanya memerlukan waktu kurang lebih 18 hari untuk sekali perjalanan (Okta, 2017).

Grafik 2. 1: Pertumbuhan GDP Tiongkok tahun 2011-2018



Sumber : Statista. (2019, Januari 5). China: growth rate of real gross domestic product (GDP) from 2011 to 2023. Diambil kembali dari Statista: <https://www.statista.com/statistics/263616/gross-domestic-product-gdp-growth-rate-in-china/>

Tetapi dari serangkaian upaya kebijakan dan keuntungan kondisi yang dimiliki, pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada rentang tahun 2013 – 2018 tercatat mengalami tren penurunan seperti yang disajikan pada grafik 2.1. Meskipun pertumbuhan GDP Tiongkok memiliki skema fluktuatif dikarenakan sempat terjadi kenaikan pada tahun 2017, tetapi arah perkembangannya cenderung mengalami penurunan dan kenaikan tersebut hanya selisih 0,2 persen. Pada gambar 2.6 di tahun 2013 GDP tahunan Tiongkok tumbuh sebesar 7,8 persen dan terus menurun hingga tahun 2016 menjadi 6,7 persen. Tahun 2017 GDP sedikit mengalami perbaikan pada angka 6,9 persen namun kembali lagi menurun pada tahun 2018 ke 6,6 persen.

Xi Jinping kembali memberikan penegasan saat berbicara dalam acara memperingati 40 tahun “reformasi dan keterbukaan” bahwa Tiongkok akan tetap optimis dan ekonomi negaranya semakin lebih baik (Zaking, 2018). Kemudian dalam pidato tersebut Xi juga menyuarakan usaha reformasi yang dilakukan Tiongkok serta bagaimana pesatnya pertumbuhan di Kota Shenzhen serta kawasan pesisir Tiongkok. Hal tersebut tidak lepas dari keikutsertaan Tiongkok di dalam organisasi perdagangan dunia dan usaha dalam membentuk kawasan perdagangan bebas.

C. Militer Tiongkok

Kekuatan militer pasti dimiliki oleh negara mana pun di belahan dunia dikarenakan militer merupakan barisan paling depan dalam pertahanan negara. Kekuatan militer tersebut tentunya sangat beragam antar negara satu dengan lainnya serta ditujukan dan difungsikan untuk apa juga akan berbeda tergantung dari kebijakan negara itu sendiri. Untuk menentukan dari seberapa kuat kekuatan militer dari suatu negara bisa dilihat dari berapa banyak jumlah personel yang aktif, berapa besar anggaran militernya dan seberapa banyak serta modern bidang alutsistanya.

1. Profil Militer Tiongkok

Tingkat kekuatan militer juga sering dikaitkan dengan dimana kedudukan dari negara tersebut di dalam dunia internasional. Berdasarkan data dari globalfirepower.com Tiongkok menduduki peringkat militer ke-3 skala internasional, urutan pertama diduduki oleh Amerika Serikat dan yang kedua adalah Rusia (GlobalFirePower.com, 2019). Globalfirepower (GFP) adalah sebuah lembaga independen yang terus mengumpulkan data statistik mengenai kekuatan militer dari seluruh negara sejak tahun 2006 hingga sekarang.

Tentara Pembebasan Rakyat atau *People's Liberation Army* (PLA) merupakan organisasi terpadu dari kesatuan angkatan bersenjata resmi atau tentara nasional negara Tiongkok yang memiliki motto "*serve the people*". Angkatan bersenjata Tiongkok ini terbentuk pada tanggal 1 Agustus 1927 saat terjadi Pemberontakan Nanchang. Dalam membuat keputusan, PLA memiliki sebuah badan yang memiliki wewenang atas hak tersebut dan memiliki kontrol penuh atas komando yaitu *Central Military Commission* (CMC). Pada tubuh CMC setidaknya terdapat 3 struktur di dalamnya, kemudian akan bercabang menjadi 3 bagian yaitu sektor departemen, komisi dan kantor dan akan mencabang kembali menjadi 4 bagian. Jumlah personel keseluruhan dari PLA pada tahun 2018 tercatat sebanyak 2,03 juta dengan 510.000 diantaranya adalah pasukan cadangan (International Institute for Strategic Studies, 2018, hal. 249-259).

Pemimpin dari CMC sendiri untuk saat ini adalah Xi Jinping dimana sekaligus merangkap jabatan sebagai Presiden Tiongkok dan Sekretaris Jendral Partai Komunis China (PKC). Kemudian struktur di bawahnya adalah wakil ketua atau *Vice Chairman* yang diduduki oleh Geng Xu Xiliang dan Geng Zhang Youxia. Selanjutnya adalah bagian member yang terdiri atas 4 anggota dimana masing-masing memiliki jabatan tersendiri yaitu Gen Wei Fenghe sebagai menteri pertahanan

nasional, Li Zhuo Cheng sebagai *Joint Staff Department* (JSD), Miao Hua sebagai direktur departemen pekerjaan politik, dan Zhang Shengmin sebagai sekretaris komisi inspeksi disiplin. Setelah itu susunan berikutnya akan dibagi kembali menjadi 3 bagian. *Pertama*, bagian *Department* yang terdiri atas *Joint Staff Department*, *Political Work Department*, *Logistics Support Department*, *Equipment Development Department*, *Training and Administration Department* dan *National Defense Mobilization Department*. *Kedua* adalah bagian *Commissions* yang terdiri atas *Discipline Inspection Commission*, *Politics & Law Commission*, dan *Science & Technology Commission*. *Ketiga* adalah bagian untuk perkantoran terdiri atas *Agency for Offices Administration*, *Audit Office*, *Office for International Military Cooperation*, *Reform & Organization Office*, dan *Strategic Planning Office* (Office of the Secretary of Defense, 2018, hal. 4).

Hierarki selanjutnya akan dibagi menjadi 4 bagian yaitu *Theater Commands*, *Services & Support Forces*, *Schools*, dan *Paramilitary Forces*. Untuk bagian *Theater Commands* terdiri dari *Eastern Theater*, *Southern Theater*, *Western Theater*, *Northern Theater*, dan *Central Theater*. Kemudian untuk bagian *Service & Support Forces* terbagi atas *PLA Ground Force* (PLAGF), *PLA Air Force* (PLAAF), *PLA Navy* (PLAN), *PLA Rocket Force*, *PLA Strategic Support Force*, dan *PLA Joint Logistics Support Force*. Selanjutnya pada bagian *Schools* akan terbagi menjadi *Academy of Military Science*, *National Defense University*, dan *National University of Defense Technology*. Lalu untuk yang terakhir adalah *Paramilitary Forces* yang terdiri atas *People's Armed Police*, *China Coast Guard*, dan *People's Armed Forces Maritime Milita* (Office of the Secretary of Defense, 2018, hal. 4).

Sejak dari awal militer Tiongkok telah menerapkan sebuah kebijakan pertahanan nasional yang bersifat bertahan atau defensif dan perlindungan atas kedaulatan nasional,

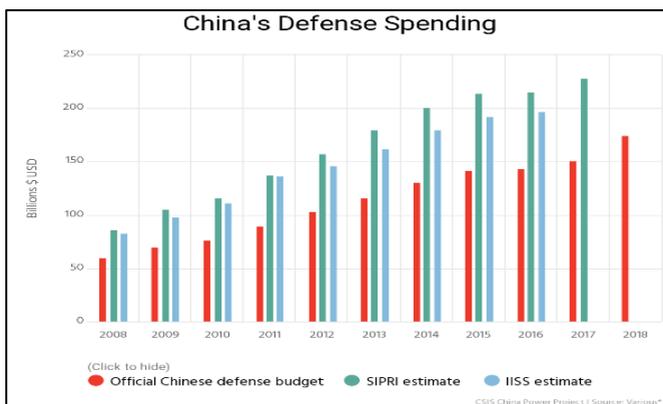
menjaga keamanan pembangunan nasional, integritas, serta menjaga keamanan masyarakat menjadi prioritas utama bagi Tiongkok (Ministry of National Defense The People's Republic of China, 2019). PLA juga terbagi atas 7 bagian daerah militer di wilayah di Tiongkok, yaitu daerah militer Nanjing, Guangzhou, Jinan, Chengdu, Shenyang, Lanzhou dan Beijing. Selain militer resmi di Tiongkok juga terdapat anggota paramiliter, yaitu sebuah kekuatan semi militer dimana kekuatan, struktur organisasi dan berfungsi hampir mirip dengan militer profesional. Sementara itu total dari personel paramiliter Tiongkok adalah 17,8 juta yang terdiri dari 3 komposisi bagian yaitu militer cadangan PLA, *People's Armed Police* (PAP) dan *Militia* (Globalsecurity.org, 2019). Paramiliter memiliki tugas untuk tambahan pasukan dari tentara PLA dan umumnya melakukan berbagai peran.

2. Kenaikan Anggaran Militer Tiongkok

Dalam kegiatan pengoperasian seluruh kegiatan militer tentunya tidak lepas dari sebuah anggaran keuangan. Dengan jumlah personil serta seluruh kekuatan alutsista yang dimiliki, Tiongkok tentunya harus siap dan mengalokasikan anggaran belanja maupun anggaran perawatan militernya.

Sebuah keputusan kebijakan yang mengharuskan adanya anggaran, maka hal tersebut harus segera dipenuhi agar kebijakan tersebut dapat terlaksana. Karena anggaran merupakan sebuah alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi atau sejenisnya. Tiongkok terus meningkatkan anggaran militernya meskipun pada masa pemerintahan Xi Jinping tahun 2013-2018 sedang mengalami banyak fenomena yang harus dihadapi. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang penelitian ini, Tiongkok secara perlahan meningkatkan anggaran militernya baik secara nominal maupun persentase dari GDP negara.

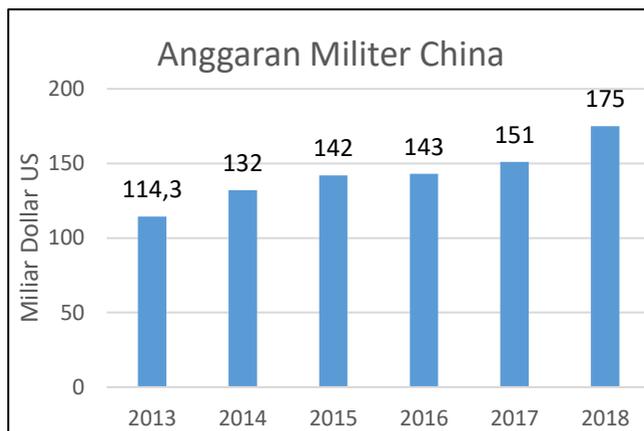
Grafik 2. 2 : Peningkatan anggaran militer Tiongkok 3 sumber



Sumber : Chinapower. (2018, Oktober 9). *What does China really spend on its military?* Diakses dari Chinapower: <https://chinapower.csis.org/military-spending/>

Pada grafik 2.2 merupakan sebuah data perkembangan jumlah anggaran militer Tiongkok yang meningkat dan dapat dilihat untuk tahun 2013-2018 yang menunjukkan tren terus mengalami pertumbuhan saat masa pemerintahan Xi Jinping. Warna merah merupakan anggaran pertahanan militer yang dirilis oleh Tiongkok secara resmi. Anggaran tersebut diumumkan secara langsung serta bersifat resmi pada setiap tahunnya saat bulan Maret. Kemudian untuk warna hijau dan biru data tersebut diperoleh dari SIPRI dan IISS, dua lembaga tersebut merupakan lembaga eksternal independen yang terus memantau serta mengeluarkan laporan estimasi anggaran militer untuk setiap negara (Chinapower, 2018).

Grafik 2. 3 : Peningkatan anggaran militer Tiongkok tahun 2013-2018



Sumber : Globalsecurity.org. (2018, Maret 24). *China's Defense Budget*. Diakses dari Globalsecurity.org: <https://www.globalsecurity.org/military/world/china/budget.htm>

Dapat dilihat pada grafik 2.3 merupakan data perkembangan nominal anggaran militer Tiongkok dari tahun 2013 hingga 2018. Tahun 2013 tercatat anggaran militer Tiongkok pada nominal 114,3 miliar dolar Amerika, naik menjadi 132 miliar dolar Amerika pada tahun 2014. Tahun 2015 anggaran militer mengalami kenaikan lebih banyak jika dibandingkan di tahun 2014 yaitu sebesar 142 miliar dolar, namun untuk tahun 2016 kenaikan anggaran tidak terlalu signifikan karena hanya 143 miliar dolar. Lalu untuk tahun 2017 dan 2018 anggaran kembali mengalami peningkatan yang signifikan yaitu berada di angka 151 dolar dan 175 dolar (Globalsecurity.org, 2018).

Sementara itu *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI) juga selalu mengeluarkan sebuah laporan data mengenai militer tiap negara secara rutin pada setiap

tahunnya. SIPRI merupakan sebuah lembaga internasional independen berbasis di Stockholm yang secara khusus melakukan penelitian mengenai bidang militer meliputi anggaran pertahanan, kekuatan senjata, dan kasus konflik di seluruh dunia. Didirikan pada 6 Mei 1966 dan telah memberikan data, analisa serta rekomendasi berdasarkan sumber dari informasi terbuka, pembuat kebijakan, dan peneliti (SIPRI, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh SIPRI memberikan estimasi gambaran bahwa Tiongkok selalu menaikkan anggaran militernya, namun estimasi anggaran tersebut sedikit lebih besar jika dibandingkan dengan anggaran militer yang resmi dirilis oleh pemerintah Tiongkok secara langsung. SIPRI mempunyai alasan tersendiri atas mengapa dalam memberikan estimasi data anggaran dana sedikit diatas dari angka resmi yang diumumkan, hal tersebut karena kurangnya transparansi yang dilakukan oleh Tiongkok, sedikitnya laporan mengenai distribusi atas anggaran dana tersebut.